

**“ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN SIMPAN PINJAM TANGGUNG RENTENG DI BUMDESMA
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO”**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER**

ILMU SYARIAH

OLEH:

DIANA LAILATUS SA'DIYAH

19203010056

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. MOCHAMAD SODIK S.Sos, M.Si.

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang belum dapat terselesaikan secara tuntas oleh pemerintah. Oleh karena itu saat ini di Indonesia pemerintah sedang giat-giatnya melakukan upaya pembangunan. Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia merencanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang kemudian bertransformasi menjadi BUMDESMA. Salah satu bentuk kegiatan di BUMDESMA adalah Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dengan sistem tanggung renteng. Namun dalam praktiknya dalam perjanjian simpan pinjam ini para debitur banyak melakukan wanprestasi berupa kredit macet, padahal sistem tanggung renteng sudah dibuat untuk meminimalisir terjadinya kredit macet. Hal ini tentu akan menimbulkan dampak yang merugikan banyak pihak.

Kajian tesis ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*), dengan pendekatan Sosiologi Hukum yang bersifat deskriptif analitis filosofis, kemudian pendekatan tersebut dikaitkan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada sistem tanggung renteng di BUMDESMA serta kesadaran hukum masyarakat terhadap perjanjian simpan pinjam. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara serta dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah mencari faktor-faktor yang mendorong terjadinya wanprestasi untuk menganalisis dari sudut pandang sosiologis hukum mengenai praktik wanprestasi di BUMDESMA Bayan. Dalam penelitian ini menggunakan konsep sosiologi pengetahuan dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dan kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

Setelah dilakukan penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum didapatkan kesimpulan bahwa banyaknya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam SPP tanggung renteng disebabkan adanya faktor-faktor sosial diantaranya pengetahuan masyarakat Bayan mengenai kesepakatan perjanjian, pola kehidupan masyarakat khususnya perempuan yang dekat dengan hal-hal konsumtif dan kondisi perekonomian. Faktor tersebut mendorong konstruksi sosial yang dibentuk sebagai budaya atau kebiasaan masyarakat Bayan. Sehingga kredit macet sudah dianggap lumrah dan menjadi karakter atau kebiasaan. Hal itu juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum sebagai kenyataan subjektif anggota kelompok. Selain itu mekanisme penyelesaian yang digunakan juga menggunakan adat kebiasaan masyarakat Bayan dengan musyawarah dan kekeluargaan.

Kata Kunci: BUMDESMA, Wanprestasi, Kontruksi Sosial.

ABSTRACT

Poverty is a problem that has not been completely resolved by the government. Therefore, currently in Indonesia the government is actively making development efforts. In 2007 the Government of Indonesia planned a National Program for Independent Community Empowerment which was later transformed into BUMDESMA. One form of activity in BUMDESMA is the Women's Savings and Loans Group (SPP) with a joint responsibility system. However, in practice, in this savings and loan agreement, many debtors default in the form of bad loans, even though the joint responsibility system has been created to minimize the occurrence of bad loans. This will certainly have a detrimental impact on many parties.

This thesis study uses a type of field research, with a Sociology of Law approach that is descriptive analytical philosophical, then the approach is related to the factors that cause default in the joint responsibility system in BUMDESMA and public legal awareness of savings and loan agreements. While the data collection method using interviews and documentation. The purpose of this study is to find out the factors that drive the occurrence of default in order to analyze from a sociological point of view the practice of default in BUMDESMA Bayan. This study uses the concept of the sociology of knowledge with the social construction theory of Peter L. Berger and Thomas Luckmann and Soerjono Soekanto's legal awareness.

After doing research using the sociology of law approach, it was concluded that the number of defaults in the savings and loan agreements of SPP with joint responsibility was due to social factors including the knowledge of the Bayan community regarding the agreement agreement, the pattern of community life, especially women who were close to consumptive matters and economic conditions. These factors encourage social construction that is formed as a culture or habit of the Bayan community. So that bad credit is considered normal and becomes a character or habit. It is also influenced by legal awareness as a subjective reality of group members. In addition, the settlement mechanism used also uses the customs of the Bayan community with deliberation and kinship.

Keyword: BUMDESMA, Default, Social Construction.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Lailatus Sa'diyah, S.H.
NIM : 19203010056
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Diana Lailatus Sa'diyah, S.H

NIM.19203010056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Diana Lailatus Sa'diyah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Diana Lailatus Sa'diyah, S.H.
NIM : 19203010056
Judul : "ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM
PADA SISTEM TANGGUNG RENTENG DI BUMDESMA
(BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA)"(Studi Kasus di
Kantor BUMDESMA Kecamatan Bayan)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 11 Juli 2021 M.
1 Zulhijah 1442 H.

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-593/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM TANGGUNG RENTENG DI BUMDESMA KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIANA LAILATUS SA'DIYAH, S. H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010056
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 611db21e58526



Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 611c8e2ed13e8



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 611c741920150



Yogyakarta, 06 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 611e56459adfc

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَ جَدَّ

“Man Jadda WaJada”

**“Barangsiapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan
hasil**

”-where there is a will there is a way !”

“Dimana ada kemauan, pasti disitu ada Jalan “

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

**kedua orangtua, adik, sahabat,
teman-teman dan orang-orang disekitar saya.**

**Terima kasih atas kasih sayang, doa,
serta dukungan yang telah diberikan selama ini.**

SEMOGA ALLAH SELALU MERIDHOI JALAN KALIAN

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We

هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أ	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I

أ	Dammah	Ditulis	U
---	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
------------	---------	-----------

الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs
------------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشمسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

`Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan yang tiada terkira sehingga proses penyusunan tesis dengan judul “ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM TANGGUNG RENTENG DI BUMDESMA KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO” dapat terselesaikan. Terima kasih atas bimbingan dan petunjuk yang Engkau berikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mencintainya. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Drs, H. Makhrus S.H. M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam membantu penyelesaian tesis ini, penyusun merasa sangat perlu memberikan apresiasi yang besar kepada beliau.
2. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag. M. Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut staf dan jajarannya. Tanpa mereka, tentu mekanisme prosedural dalam penyelesaian Tesis ini juga tidak akan mudah.
3. Bapak Dr. Mochamad Sodik S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya tesis ini dan segenap dosen Ilmu Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir
4. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung/tidak dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh Informan yakni para pegawai di BUMDESMA Bayan, dan para nasabah yang telah bersedia untuk diwawancarai.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Nasrudin dan Ibu Nani Rokhimah yang selalu mendoakan dan memberi dukungan, kasih sayang, semangat dan mencurahkan segalanya untuk saya.
7. Adik saya yakni Riris Khoirunnisa' yang selalu mendoakan saya dan memberikan semangat serta kasih sayangnya untuk saya.

8. Teman-teman saya yang telah membantu saya ketika dalam kesulitan dan selalu memberikan support dalam proses penulisan Tesis.

Yogyakarta, 25 Juli 2021

Penulis,



Diana Lailatus Sa'diyah
NIM: 19203010056



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Kerangka Teori	18

F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penyusunan.....	32
BAB II LANDASAN TEORI	34
A. Konsep Perjanjian	34
1. Perjanjian Menurut Ahli	34
2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	36
3. Asas Dasar dalam Perjanjian	39
4. Akibat Hukum Sahnya Perjanjian.....	46
5. Hapusnya Perjanjian	47
B. Kredit	49
1. Kredit Secara Umum	49
2. Pelaksanaan Prinsip 5c dalam Kredit.....	56
3. Terjadinya Kredit Macet	58
C. Penerapan Sistem tanggung renteng	64
1. Sistem Tanggung Renteng.....	64
2. Unsur-Unsur dalam Tanggung Renteng.....	67
3. Tanggung Renteng dalam Islam.....	68
4. Mekanisme Tanggung Renteng.....	69
BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	72
A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo.....	72
1. Letak, Luas dan Batas Daerah Penelitian	72
2. Kehidupan Sosial dan Mata Pencaharian	73
3. Pendidikan dan Agama	80
B. Praktik Simpan Pinjam Perempuan di BUMDESMA Bayan	82
1. Data Simpan Pinjam	82
2. Proses Pemberian Kredit	90
3. Persyaratan Pengajuan Pinjaman	91
4. Perjanjian Simpan Pinjam.....	92

BAB IV ANALISIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DI BUMDESMA BAYAN .	95
A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Wanprestasi di BUMDESMA.....	95
B. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam Sistem Tanggung Renteng di BUMDESMA.....	110
C. Analisis Sosiologi Hukum Islam tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam Sistem Tanggung Renteng di BUMDESMA	116
BAB V PENUTUP.....	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA.....	140
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kolektibilitas Kredit Macet di BUMDESMA Bulan Januari 2021

Tabel 1.2 Data Kolektibilitas Kredit Macet di BUMDESMA Bulan Februari 2021

Tabel 3.1 Jumlah Kegiatan Utama Wilayah Purworejo

Tabel 3.2 Status Pekerjaan Utama Wilayah Purworejo

Tabel 3.3 Data Tunggakan dan Bunga Bulan Februari 2021



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2020

Gambar 3.2 Persentase Pengeluaran Bukan Makanan Penduduk Purworejo



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Terjemahan Al- Qur'an dan Hadis

LAMPIRAN 2 Laporan Kolektibilitas Bulan Januari 2021

LAMPIRAN 3 Laporan Kolektibilitas Bulan Februari 2021

LAMPIRAN 4 Struktur Organisasi

LAMPIRAN 5 Proses Verifikasi

LAMPIRAN 6 Laporan Lengkap Pinjaman Bulan Januari

LAMPIRAN 7 Laporan Lengkap Pinjaman Bulan Februari

LAMPIRAN 8 Dokumen Penyaluran

LAMPIRAN 9 Proposal Pinjaman



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang belum dapat terselesaikan secara tuntas oleh pemerintah. Menurut badan statistik persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.¹

Oleh karena itu saat ini di Indonesia pemerintah sedang giat-giatnya melakukan upaya pembangunan. Langkah pemerintah ini memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dengan membentuk lembaga-lembaga keuangan di sektor pedesaan. Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia merencanakan Program Nasional Pemberdayaan

¹ Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen*, diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>, pada Kamis 25 februari pukul 8.25 wib.

Masyarakat Mandiri (PNPM) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini diharapkan agar dapat menanggulangi angka kemiskinan di Indonesia.²

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di kecamatan, yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung oleh struktur organisasi yang melibatkan unsur instansi pemerintah, fasilitator, konsultan pendamping, masyarakat baik pusat maupun daerah (BKAD).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, dan dilanjutkan berdasarkan surat keputusan menteri No.414.2./675/PMD Tahun.³

² Aswan Asqolani, *Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm-Mp-Spp) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun*, Program Diploma IV Manajemen Pemerintahan (Universitas Jambi, 2017).

Namun pada tahun 2014 dana bantuan dari pemerintah untuk PNPM Mandiri resmi diberhentikan dan sekarang menjadi BUMDESMA. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) merupakan transformasi dari hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini sendiri dimulai sejak tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2014. Dan pada saat itu juga pemerintah memutuskan bantuan untuk lembaga tersebut tanpa ada pengarahannya yang jelas. Pada awalnya para pengurus juga kebingungan karena dana yang tersisa cukup banyak. Akhirnya, para pengurus memutuskan untuk tetap meneruskan program tersebut dengan nama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) yang karakternya mirip dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dasar yang digunakan yaitu Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 Undang-Undang yang tidak paten.⁴ Fungsi dan kegunaan dana masih sama yaitu untuk mengembangkan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dibentuk sejak berjalannya PNPM dulu.

Sasaran dari program ini sebenarnya sama dengan program eks PNPM dahulu yaitu masyarakat dikecamatan yang tergolong miskin dalam pembangunan berkelanjutan. kriteria masyarakat penerima bantuan adalah Kepala keluarga yang kekurangan modal untuk memenuhi kebutuhan anggotanya keluarganya dan mengembangkan usaha untuk kesejahteraan, pendapatan tidak cukup untuk

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, dan dilanjutkan berdasarkan surat keputusan menteri No.414.2./675/PMD Tahun.

membiyai kebutuhan minimum atau sehari harinya, rendahnya pendapatan yang disebabkan oleh sarana dan prasarana fisik akibat kelangkaan modal, masyarakat miskin yang cacat dan tidak memiliki Pendapatan tetap.⁵

Tujuan dari dibentuknya BUMDESMA ini adalah untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (vide penjelasan Pasal 87 ayat 1 UU Desa). Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin diperdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa untuk mewujudkan usaha kecil yang berkembang dan juga salah satu upaya mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah perlu menyediakan sarana permodalan guna mengembangkan usahanya.⁶

Salah satu bentuk kegiatan perluasan kesempatan dan peluang pengembangan usaha yang didanai oleh eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) yang sekarang menjadi BUMDESMA adalah kegiatan Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP). Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan,

⁵ Raisa Betsaida Hutabarat, "Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpmd) Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar", *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2016.hlm. 2.

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 87 ayat (1)

serta pengembangan ekonomi masyarakat di pedesaan. Dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) yang dilanjutkan dengan program BUMDESMA ini diharapkan dapat menjadi modal yang mudah dijangkau dan bermanfaat secara berkelanjutan terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok perempuan di pedesaan.⁷

Secara umum Simpan Pinjam Perempuan (SPP) eks PNPM Mandiri Perdesaan yang bertransformasi menjadi BUMDESMA ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Sesuai kebijakan dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dana yang digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam adalah pinjaman yang harus dikembalikan dan kemudian digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya (dana pinjaman bergulir). Kegiatan tersebut diharapkan dapat:⁸

- a. Meningkatkan kegiatan usaha
- b. Memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan
- c. Mengembangkan ekonomi masyarakat pedesaan

⁷ Mr. Sinollah, "Peranan Simpan pinjam perempuan dalam PNPM-MP untuk kesejahteraan masyarakat", *Jurnal Dialektika*, Volume 4, Nomor 2, September 2019, hlm 32.

⁸ Ibid., hlm. 34.

- d. Menjadi modal yang mudah dijangkau dan bermanfaat secara berkelanjutan terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok perempuan di perdesaan.

Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo salah satu kecamatan yang masih mengembangkan dana dari simpan pinjam eks pnpm yang sampai sekarang masih bergulir dengan aturan baru BUMDESMA. Hal ini dikarenakan kemiskinan di kabupaten Purworejo masih tinggi dan dana simpan pinjam masih terus bergulir dikalangan masyarakat. Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maemun, SHI, mengatakan bahwa di Jawa Tengah terdapat 14 kabupaten/kota yang masih tercatat tinggi tingkat kemiskinannya termasuk Kabupaten Purworejo, Dalam Rakor TKPK Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada hari Seni tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VII Prov Jateng, Jl Slamet Riyadi No 1 Surakarta, Bappeda Provinsi Jawa Tengah selaku sekretariat TKPK provinsi menyampaikan hasil rilis BPS terkait angka kemiskinan. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2020 sebesar 11,41 persen, naik 0,83 persen poin dibandingkan periode September 2019, sedangkan kenaikan kemiskinan Indonesia sebesar 0,56 persen poin. Di Kabupaten Purworejo 11,78 persen naik 0,33 persen poin dibanding tahun 2019 dan masih diatas provinsi dan nasional.⁹

⁹ Bappeda, *Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami kenaikan*, diakses dari <https://bappeda.purworejokab.go.id/tingkat-kemiskinan-kabupatenkota-di-jawa-tengah-mengalami-kenaikan>, pada Kamis 25 february pukul 8.25wib.

Dalam program simpan pinjam ini terdapat perjanjian kredit secara tertulis, yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan persyaratan yang mudah dan prosedur yang sederhana, tidak ada jaminan dan bunga yang besar. Dalam hal ini perjanjian kredit tentunya harus memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan hukum kontrak atau perjanjian, hal ini untuk menghindarkan dari permasalahan sengketa melihat perjanjian kredit yang tanpa jaminan. Hal ini dilakukan karena pihak debitur sering lalai dalam mengembalikan pinjaman karena tidak sesuai jadwal dan terkadang debitur tidak mau membayar atau yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor tidak berjalannya usaha maupun faktor yang untuk mengembalikan pinjaman modal usahanya sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada bulan Januari 2021 – Februari 2021 terjadi peningkatan kredit macet dengan data sebagai berikut:¹⁰

No	Tingkat Kolektibilitas	Jumlah Pinjaman
1.	Kolektibilitas I	1.333.885.300
2.	Kolektibilitas II	251.147.700
3.	Kolektibilitas III	61.267.000
4.	Kolektibilitas IV	127.475.200
5.	Kolektibilitas V	868.207.600
Total		2.642.002.800

Tabel 1.1 Bulan Januari 2021

¹⁰ Laporan bulanan BUMDESMA Bayan

No	Tingkat Kolektibilitas	Jumlah Pinjaman
1.	Kolektibilitas I	1.555.340.500
2.	Kolektibilitas II	264.774.000
3.	Kolektibilitas III	88.758.000
4.	Kolektibilitas IV	46.504.600
5.	Kolektibilitas V	802. 854.200
Total		2.858.332.300

Tabel 1.2 Bulan Februari 2021

Pada data diatas dapat dilihat angka pinjaman pada bulan february mengalami kenaikan, namun angka kredit macet juga naik. Hal ini memunculkan pertanyaan ketika permasalahan kredit macet yang dilakukan debitur seharusnya dapat diminimalisir dengan adanya sistem tanggung renteng, dimana jika terjadi penunggakan angsuran kelompok yang disebabkan oleh beberapa anggota ataupun oleh salah satu kelompok akan ditanggung secara renteng atau bersama-sama. Namun pada kenyataannya di kecamatan Bayan sendiri masih banyak terjadi wanprestasi atau pelanggaran dari debitur dengan tidak adanya pengembalian dana pinjaman.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan

debitur.¹¹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹²

Hal ini tentu akan sangat merugikan bagi debitur lain yang ikut menanggung akibatnya serta mengakibatkan tidak dapat berputarnya uang eks PNPM Mandiri yang sekarang dikelola BUMDESMA karena sistem simpan pinjam itu berbentuk gotong royong, dimana dana dari BUMDESMA tersebut harus berputar untuk dapat meminjamkan modal kepada kelompok masyarakat lainnya. Dana simpan pinjam itu dinilai berpotensi besar jika bergulir dengan lancar hingga tetap dipertahankan sampai sekarang dengan program baru bernama BUMDESMA.

Dalam hukum Islam kredit biasa disebut sebagai Qardh. Secara istilah, menurut Hanafiah qard adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.¹³ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah qard} adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan Syari'ah dengan pihak

¹¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm.180.

¹² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007),hlm. 74.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374.

peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu.¹⁴

Dalam hukum Islam kredit diperbolehkan karena memudahkan orang lain yang membutuhkan. Namun dalam Islam Allah SWT juga mewajibkan kepada para debitur untuk melunasi hutangnya dengan tepat membayar angsuran sesuai dengan kewajibannya. Hal ini dibuktikan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam Bukhari sebagai berikut:¹⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ
النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَنْتَفَهُ اللَّهُ

Dalam hadis ini Allah SWT memberikan peringatan kepada orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya dengan baik dan melarang untuk tidak membayar kewajiban membayar hutang. Untuk itu kewajiban dalam membayar hutang dan tidak menunda-nunda pembayarannya sangat diwajibkan dalam Islam.

Maka dari itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar hutang secara tepat waktu adalah salah satu solusi untuk mengentaskan angka kredit macet yang banyak terjadi khususnya di BUMDESMA Kecamatan Bayan. Hal ini perlu diketahui penyebab atau faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kredit macet

¹⁴ Pasal 20 ayat 36, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia, 2010), hlm.18.

¹⁵ Imam al-Bukhari dan Abu Hasan al-Sindi, S}hahih al-Bukhari bih}asiyat al-Imam al-Sindi, juz II, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), hlm. 105.

walaupun sistem kredit dalam program simpan pinjam sudah dilaksanakan secara tanggung renteng. Namun, wanprestasi debitur dalam membayar kewajibannya masih terjadi. Mengingat dana yang digunakan dalam program BUMDESMA ini tidak sedikit dan kredit macet akan menyebabkan terjadinya kerugian yang sangat besar bagi lembaga BUMDESMA maupun masyarakat sendiri. Penelitian ini akan lebih berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada sistem tanggung renteng di eks PNPM Mandiri yang berganti nama menjadi BUMDESMA melalui pendekatan sosiologi hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam sistem tanggung renteng antara kelompok masyarakat dengan BUMDESMA?
2. Bagaimana skema penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam sistem tanggung renteng antara kelompok masyarakat dengan BUMDESMA?
3. Bagaimana perspektif sosiologi hukum terhadap praktik wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam sistem tanggung renteng antara kelompok masyarakat dengan BUMDESMA?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan di dalam rumusan masalah.

Adapun tujuan dari penyusunan tesis adalah :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor terjadinya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam sistem tanggung renteng antara kelompok masyarakat dengan BUMDESMA.
2. Untuk menganalisis skema penyelesaian masalah wanprestasi pada perjanjian simpan pinjam sistem tanggung renteng antara kelompok masyarakat dengan BUMDESMA.
3. Untuk menganalisis perspektif sosiologi hukum terhadap praktik wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam sistem tanggung renteng antara kelompok masyarakat dengan BUMDESMA.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan referensi bagi pihak unit pengelola kegiatan lembaga BUMDESMA agar lebih memperhatikan calon nasabah agar dapat dipercaya untuk mengembalikan dana.

2. Dapat menambah kemampuan, pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir bagi penyusun serta dapat digunakan sebagai dasar bagi peneliti-peneliti berikutnya yang mengambil permasalahan yang sama.
3. Bagi pendidik dan akademisi, dapat menjadi sumber referensi tambahan, sebagai sumber informasi dan wawasan lebih dalam terkait analisis sosiologi hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam sistem tanggung renteng antara kelompok masyarakat dengan BUMDESMA. sehingga diharapkan nantinya menjadi perangsang pihak lain akan munculnya penelitian-penelitian baru yang lebih lanjut dan lebih baik.

D. Tinjauan Pustaka

Demi memperkaya penelitian ini, perlu dicantumkan beberapa karya ilmiah atau hasil penelitian relevan sebagai tinjauan pustaka, berikut adalah beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Disertasi karya Hadi Sulisty, yang berjudul Permodelan Transformasi Kelembagaan Pengelolaan Dana Bergulir UPK PNPM Mandiri Perdesaan Pasca Pengakhiran Program. Karya ini membahas tentang bagaimana kelanjutan program dana bergulir pada PNPM setelah programnya diakhiri oleh pemerintah dengan mengidentifikasi dan menganalisis model kelembagaan pasca transformasi PNPM. Dari disertasi ini didapatkan kesimpulan bahwa salah satu kelembagaan

bertransformasi menjadi BUMDESMA. Hasil analisis model kelembagaan ini masih terdapat perbedaan dan persamaannya dengan dasar hukum, program dan mekanisme yang dijalankan oleh PNPM. Dalam penelitian ini juga disampaikan beberapa permasalahan atau faktor yang menjadi latar belakang dibubarkannya lembaga UPK PNPM. Mengingat program ini sangat efektif terhadap pendapatan dan kesempatan kerja maka penelitian ini sangat penting dilakukan karena permasalahan wanprestasi dapat menghambat kesejahteraan masyarakat khususnya ditingkat bawah. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa perlu adanya pengelolaan dana yang tegas sebagai dana abadi masyarakat serta pentingnya badan hukum kelembagaan untuk diimplementasikan. Untuk itu tesis ini akan melanjutkan analisis dari disertasi karya Hadi Sulistyو mengingat perkembangan permasalahan yang semakin beragam di BUMDESMA. Hal ini dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektifitas dari kelembagaan BUMDESMA agar nantinya dapat diketahui dan dianalisis untuk menghilangkan faktor-faktor buruk dalam program ini.

Jurnal karya Maulinda Firdaus dan Imam Agus Faisol yang berjudul Perspektif Akuntansi Atas Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Study Kasus BUMDESMA Kampung Batik Di Desa Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan), yang dimuat dalam Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 08, No.02. Jurnal ini membahas tentang tata kelola keuangan BUMDESMA di Kampung Batik Desa Klampar berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Dari jurnal didapatkan kesimpulan bahwa Tata

kelola keuangan BUMDESMA belum sepenuhnya menerapkan prinsip pengelolaan keuangan dengan baik. Penyusunan laporan keuangan di BUMDESMA Kampung Batik di susun dengan sederhana, yaitu hanya membuat buku bantu bank dan buku kas umum, karena pihak BUMDESMA lebih mengutamakan kejelasan dari laporan keuangan yang dibuat agar dapat dipahami dan dimengerti oleh anggota BUMDESMA, dalam penyajian laporan keuangan Bumdesma Kampung Batik belum sesuai dengan SAK-ETAP. Dalam jurnal ini juga diuraikan mengenai penyebab permasalahan dan kendala yang dihadapi lembaga keuangan ini. Dimana tesis ini juga akan mencari faktor-faktor penyebab wanprestasi dari pihak internal yaitu dari lembaga BUMDESMA itu sendiri. Jurnal ini dapat membantu penulisan karena tata kelola keuangan BUMDESMA itu sendiri dapat berpengaruh besar terhadap wanprestasi yang terjadi antara BUMDESMA dengan para anggota kelompok masyarakat. Untuk itu tesis ini juga akan sangat melengkapi jurnal karya Maulinda Firdaus dan Imam Agus Faisol.

Jurnal karya Udin Saripudin, berjudul Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Upk Gerbang Emas Bandung), yang dimuat dalam jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013. Jurnal ini membahas tentang sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam program PNPM dalam perspektif ekonomi Islam. Dari jurnal ini didapatkan kesimpulan bahwa sistem tanggung renteng dalam program PNPM sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan adanya penulisan ini maka tesis ini dapat melengkapi dengan sudut

pandang analisis yang lain dalam sistem tanggung renteng di PNPM Mandiri yaitu dengan pisau analisis sosiologi hukum terhadap wanprestasi yang terjadi dalam sistem tanggung renteng tersebut. Selain itu jurnal ini akan menjadi referensi dalam menganalisis sistem tanggung renteng di BUMDESMA, dimana BUMDESMA adalah program lanjutan dari eks PNPM Mandiri. Dalam program BUMDESMA ini juga masih mempunyai persamaan mekanisme dalam sistem tanggung renteng dan melanjutkan program PNPM terdahulu. Maka kedua penulisan ini akan saling memberikan gambaran yang lebih kompleks tentang sistem tanggung renteng baik di dalam PNPM dahulu dan BUMDESMA lanjutan dari eks PNPM.

Jurnal karya Dewi Gunherani, berjudul Edukasi Dan Pemberdayaan BUMDESMA Menuju Desa Mandiri Masyarakat Kecamatan Warungkiara Sukabumi, yang dimuat dalam jurnal *Dinamika Pendidikan* Vol.13, No.2, Juli 2020. Jurnal ini membahas tentang bagaimana upaya edukasi dan pemberdayaan BUMDESMA kecamatan Warungkiara menuju desa mandiri. Dari jurnal ini didapatkan kesimpulan bahwa terdapat dua BUMDESMA di kecamatan Warungkiara yang mempunyai masalah kesulitan finansial, keterbatasan pemasaran dan keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai masalah kesulitan finansial, keterbatasan pemasaran dan keterbatasan sumber daya manusia. Sehingga hal ini menyebabkan terhambatnya tujuan utama dibentuknya BUMDESMA yaitu mewujudkan desa yang mandiri. Jurnal ini membahas upaya edukasi dan pemberdayaan dengan mencari faktor penghambatnya secara umum, sedangkan

penelitian ini akan lebih menganalisis faktor penyebab dari sudut pandang sosiologi hukum. Dengan adanya penulisan ini maka akan menjadi pelengkap dari jurnal yang ditulis oleh Dewi Gunherani. Selain itu jurnal ini akan menjadi referensi dalam menganalisis permasalahan di BUMDESMA yang akan menjadi faktor penyebab wanprestasi dalam penulisan tesis.

Jurnal Internasional karya Rita Nengsih,dkk, yang berjudul *The Effectiveness Of Urban Independent Community Empowerment Program (Pnpm) In Tackling Poverty In Indonesia*, yang dimuat dalam *Journal of Asian Scientific Research*, 2015, 5(6):320-327. Jurnal ini membahas tentang efektivitas pemberdayaan masyarakat nasional program (PNPM) dalam menanggulangi kemiskinan perkotaan di Indonesia. Dari jurnal ini didapatkan kesimpulan bahwa para penerima manfaat berpendapat mereka terbantu dengan adanya program bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Program pemberdayaan nasional masyarakat (PNPM) secara bertahap yang telah meningkatkan ekonomi masyarakat bawah terlepas dari beberapa faktor yang menghalangi kemajuan program. Dari penulisan ini didapatkan bahwa masih ada beberapa faktor yang menjadi halangan untuk kemajuan program PNPM ini padahal program ini dinilai sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Perbedaan jurnal dengan tesis ini berada pada lembaga yang menjadi objek penelitian dan analisis, dimana pada tesis ini objeknya terletak di BUMDESMA dan menggunakan analisis sosiologi hukum. Namun keduanya sama-sama mencari faktor penghambat keberhasilan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Jurnal ini membantu dalam

menganalisis kemungkinan yang dapat menjadi penyebab wanprestasi pada penulisan tesis. Maka tesis ini akan menjadi kelanjutan dari penulisan ini agar harapan dan tujuan dari penulisan ini semakin tercapai.

E. Kerangka Teori

1. Sosiologi Pengetahuan: Kontruksi Sosial

Penelitian ini menggunakan konsep Sosiologi Pengetahuan (sociology of knowledge) dengan teori kontruksi sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Sosiologi pengetahuan merupakan cabang dari sosiologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara pemikiran dan masyarakat. Sosiologi pengetahuan menaruh perhatian pada kondisi sosial atau eksistensi pengetahuan Teori kontruksi sosial dalam sosiologi pengetahuan menasar seberapa besar pengaruh antara pengetahuan dengan kondisi sosial dan menasar historisitas pengetahuan yang mencakup pola pikir yang mendominasi dalam suatu kondisi sosial tersebut.¹⁶

Sosiologi pengetahuan, yang dikembangkan Berger dan Luckmann, mendasarkan pengetahuannya dalam dunia kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai kenyataan. Bagi mereka (kenyataan kehidupan sehari-hari dianggap menampilkan diri sebagai

¹⁶ Muhyar Fanani, Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 20.

kenyataan *parexcellence* sehingga disebutnya sebagai kenyataan utama (*paramount*). Berger dan Luckmann menyatakan dunia kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia. Maka itu, apa yang menurut manusia nyata ditemukan dalam dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu kenyataan seperti yang dialaminya.¹⁷

Dalam kenyataan obyektif, manusia secara struktural dipengaruhi oleh lingkungan di mana manusia tinggal. Dengan kata lain, arah perkembangan manusia ditentukan secara sosial, dari saat lahir hingga tumbuh dewasa dan tua. Ada hubungan timbal-balik antara diri manusia dengan konteks sosial yang membentuk identitasnya hingga terjadi habituasi dalam diri manusia. Sementara itu, dalam kenyataan subyektif, manusia dipandang sebagai organisme yang memiliki kecenderungan tertentu dalam *societas*. Dalam hal ini subyektifitas manusia bermain dalam lingkungan sosialnya. Individu telah mengambil alih dunia sosial yang telah membentuknya sesuai dengan kreatifitas yang dimiliki oleh tiap individu.

Teori konstruksi sosial dalam penelitian ini dijadikan sebagai *guidance* untuk melihat realitas sosial. Menurut Berger dan Luckmann konstruksi sosial dibangun dalam dua cara. Pertama, mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan kenyataan/realitas dengan pengetahuan. Realitas sosial adalah sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi bahasa,

¹⁷ I. B. Putera Manuaba, "Memahami Teori Konstruksi Sosial", *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Vol. 21 - No. 3 / 2008-07, hlm. 221.

kerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan realitas sosial ditemukan dalam pengalaman intersubjektif. Sedangkan pengetahuan mengenai realitas sosial berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dengan segala aspeknya melalui ranah kognitif, psikomotorik, emosional dan intuitif. Kedua, untuk meneliti sesuatu yang intersubjektif tersebut Berger menggunakan paradigma berfikir Durkheim mengenai objektifikasi dan paradigma Weber mengenai subjektivitas.

Berger dan Luckmann menggunakan proses dialektis yang dialami oleh manusia melalui tiga momen; eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Momen-momen tersebut tidak selalu berlangsung dalam suatu urutan waktu, namun masyarakat dan tiap individu yang menjadi bagian darinya secara serentak dikarakterisasi oleh ketiga momen itu, sehingga analisa dari masyarakat harus melalui tiga momen tersebut.¹⁸

Obyektivitas dunia kelembagaan adalah obyektivitas yang dibuat dan dibangun oleh manusia. Eksternalisasi dan obyektifikasi merupakan momen-momen dalam suatu proses dialektis yang berlangsung secara terus-menerus. Lembaga sosial menjadi perantara obyektifikasi untuk dipahami sebagai kenyataan oleh anggota-anggotanya. Pengetahuan mengenai masyarakat merupakan suatu perwujudan nyata dalam arti ganda, yaitu kenyataan yang diobyektivikasikan, dan dalam arti bagaimana kenyataan itu diproduksi secara terus-menerus.

¹⁸ Berger, P. L., *Piramida Kurban Manusia*, alih bahasa Rahman Tolleng (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 32.

Selain itu Berger and Luckmann juga menyebutkan bahwa dunia kehidupan sehari-hari memiliki struktur ruang dan waktu. Struktur waktu membuat seseorang harus menyesuaikan tindakannya sesuai dengan klasifikasi yang dimiliki. Ini semacam hirarki dalam tatanan sosial yang membuat seseorang tersebut terikat dengan peran-peran sosialnya. Sementara ruang akan membatasi seseorang dalam menentukan tindakan sesuai dengan siapa orang tersebut berinteraksi.

Sosiolog menekuni dan memahami makna pada level interaksi sosial. Karena itu, Berger menjadikan interaksi sosial sebagai subject matter sosiologi. Interaksi ini melibatkan hubungan individu dengan masyarakat. Individu adalah acting subject, makhluk hidup yang senantiasa.

Interaksi sosial sebagai subject matter adalah interaksi sosial dengan dimensi horisontal dan vertikal. Horisontal tak hanya bermakna interaksi antar individu dengan individu lainnya, tetapi meliputi kelompok dan struktur sosial. Karena itu faktor kultural, ekonomi, dan politik tak dapat diabaikan.

2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum

berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.¹⁹

Kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁰

Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum. Adapun indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:²¹

- a. Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku

¹⁹ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014, hlm. 3.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 215.

²¹ *Ibid.*, hlm. 125.

tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

- b. Pemahaman hukum, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan sekolah.
- c. Sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Perilaku hukum, yaitu seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah digunakan suatu metode-metode tertentu untuk dapat menjadikan penelitian berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan studi lapangan (*Field research*), maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data dengan mengamati langsung ke BUMDESMA Kecamatan Bayan. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang sedang terjadi ditengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid, peneliti

menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.

Pendekatan dalam sebuah penelitian ditujukan agar objek penelitian dapat diteliti secara lebih objektif. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Sosiologi Hukum. Sosiologi Hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Kemudian pendekatan tersebut dikaitkan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada sistem tanggung renteng di BUMDESMA serta kesadaran hukum masyarakat terhadap perjanjian simpan pinjam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif analitis filosofis. Deskriptif yang dimaksud adalah memberikan data dan informasi dengan teliti mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya wanprestasi adanya wanprestasi berupa kredit macet di BUMDESMA. Analitis adalah menjelaskan dan menganalisa data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang mendalam menggunakan konsep sosiologi pengetahuan dengan teori konstruksi sosial.

3. Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Dalam penelitian ini menggunakan sumber primer (primary source) dan kedua sumber sekunder (secondary source).

a. Sumber data primer

Data Primer adalah karangan asli yang ditulis oleh seorang yang melihat, mengalami, atau mengerjakan sendiri. Dalam penelitian ini bahan literature diperoleh dari tesis, disertasi, laporan penelitian, observasi, hasil wawancara pihak BUMDESMA kecamatan Bayan, hasil wawancara kelompok perempuan program simpan pinjam sistem tanggung renteng BUMDESMA wilayah kecamatan Bayan.

b. Sumber data

Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis untuk mendukung data primer. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah buku pegangan, indeks, buku-buku pengetahuan tentang studi yang diteliti, hasil penelitian sebelumnya, jurnal, artikel. Selain informasi pustaka penyusun menggunakan sumber data laporan tahunan dari pihak BUMDESMA.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data. Teknik pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh penyusun untuk mengumpulkan data dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer dan sekunder. Oleh karena itu dalam penyusunan ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti berikut ini:

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²² Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara untuk menghindari kesalahan informasi dan dapat memperoleh informasi tersebut secara akurat, komprehensif, dan mendalam.

Model wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara semi terstruktur. Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2007: 412) mengemukakan bahwa wawancara semiterstruktur masuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam

²² Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2012), hlm. 186.

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari permasalahan ini adalah untuk menemukan permasalahan dengan terbuka dimana pihak yang diajak wawancara akan diminta pendapat, ide, dan informasi.

Dalam melakukan wawancara ini penyusun perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Informan dipilih menggunakan teknik snow ball. Teknik sampling snowball adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Penyusun menyajikan suatu jaringan melalui gambar sociogram berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis. Setiap lingkaran mewakili satu responden atau kasus, dan garis-garis menunjukkan hubungan antar responden atau antar kasus (Neuman, 2003).²³ Dalam penyusunan ini informan yang dipilih adalah petugas pengelola BUMDESMA Kecamatan Bayan dan debitur yaitu kelompok perempuan yang mengajukan pinjaman di BUMDESMA. Wawancara diambil dari perwakilan 10 kelompok dimana setiap kelompoknya terdiri dari 10-20 orang, maka jumlah seluruhnya adalah 100 orang. Informan tersebut dipilih karena terlibat langsung dalam permasalahan wanprestasi di BUMDESMA.

²³ W. L. Neuman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, Fifth Edition, (Boston: Pearson Education, 2003).

b. Dokumentasi

G.J. Renier, sejarawan terkemuka dari University College London, menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian, pertama dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan, kedua dalam arti sempit, yaitu meliputi semua sumber tertulis saja, dan yang ketiga dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsensi, hibah dan sebagainya.²⁴

Mengenai bahan-bahan dokumen tersebut, Sartono Kartodirjo (dikutip oleh Bungin, 2008) menyebutkan berbagai bahan seperti otobiografi, surat pribadi, catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah dan swasta, cerita roman/ rakyat, foto, tape, microfilm, disk, compact disk, data di server/ flashdisk, data yang tersimpan di website dan lainnya.²⁵

Meleong mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam studi dokumentasi, yaitu dokumentasi harian dan dokumentasi resmi. Dalam penyusunan ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi resmi, menurut Meleong dokumen resmi dapat dibagi kedalam dua bagian:²⁶

²⁴ Renier, G.J., *History its Purpose and Method*, alih bahasa Muin Umar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

²⁵ Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008).

- 1) Dokumen internal, yaitu dapat berupa catatan, seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, system yang diberlakukan, hasil notulensi rapat keputusan pimpinan, dan lain sebagainya. Dalam penyusunan ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi tertulis maupun lisan. Dimana dokumen tertulis di dapat dari data atau laporan di lembaga BUMDESMA Kecamatan Bayan. Sedangkan dokumen lisan berupa hasil wawancara dari pihak pengelola BUMDESMA maupun hasil wawancara dari pihak debitur yaitu kelompok perempuan program tanggung renteng pada program simpan pinjam di BUMDESMA.
- 2) Dokumentasi eksternal yaitu dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga social, seperti majalah, koran, bulletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya. selain itu data didapat dari penyusunan terdahulu.

5. Analisis Data

Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang bagaimana data penyusunan pada gilirannya dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana.²⁷

Analisis ini merupakan upaya yang dilakukan dengan menggunakan data untuk mengorganisasikan data yang dikumpulkan, memilah-milahnya menjadi satuan yang

²⁶ Haris, Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

²⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta,2004), hlm.70.

dapat dikelola, mensintesis, mencari serta menemukan pola, menemukan hal yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁸

Pada proses analitis data dalam keabsahan data penyusun menggunakan metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu lain, diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁹

Penulis menggunakan teknik triangulasi metode yaitu menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. Pada penyusunan ini metode yang digunakan selain wawancara adalah dokumentasi.

Adapun langkah-langkah teknis data dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Data reduksi

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak. Oleh karena itu perlu dicatat dan diteliti secara rinci. Dalam proses reduksi data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis dan diutamakan pada pokok-pokok permasalahan dimana data dianggap penting. Reduksi data ini adalah sebuah cara sederhana untuk mengambil inti dari temuan data hingga dapat ditemukan fokus permasalahan dan kesimpulan. Langkah ini penulis melakukan wawancara serta

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 248.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 330.

dokumentasi. Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis menurut sosiologi hukum Islam. Dari temuan data yang disusun rapi tersebut maka penulis dapat melihat inti dari permasalahan wanprestasi di BUMDESMA Kecamatan Bayan.

2. Data display

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.³⁰ Setelah data pokok ditemukan maka data tersebut disajikan berupa bentuk teks atau narasi sehingga dapat diketahui dengan baik bagaimana hasil analisis antara teori dan praktek dalam sebuah narasi. Kemudian dilihat apakah analisis tersebut sudah menemukan kesimpulan yang tepat atau perlu analisis ulang.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penyusun secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, penyusun kualitatif mulai

³⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, hlm. 91-95.

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.³¹ Jika sudah dianalisis antara data yang disajikan dengan teori maka akan ditemukan kesimpulan. Dimana kesimpulan penulis akan menjawab pertanyaan di rumusan masalah.

G. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan yang dimaksud dalam proses penyusunan tesis ini adalah urutan persoalan yang dapat disusun dan terarah dengan baik untuk membahas rencana penyusunan tesis secara keseluruhan dari awal hingga akhir, yang akan dibagi menjadi beberapa bab pembahasan yang akan menjadi acuan, diantaranya adalah:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantar tesis secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penyusunan dan sistematika pembahasan.

³¹ Ibid.,

Bab kedua, adalah sebagai teori-teori untuk membantu memecahkan masalah dalam tesis ini. Oleh karena itu, bab kedua ini akan diuraikan mengenai teori tentang sosiologi hukum.

Bab Ketiga, membahas gambaran umum tentang tempat yang akan dijadikan objek penyusunan dimana bertujuan untuk mengetahui letak tempat yang dijadikan objek penyusunan, yang meliputi deskripsi tempat praktik wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam sistem tanggung renteng antara kelompok masyarakat, kehidupan sosial dan keagamaan, serta praktik kredit macet tersebut dan tanggapan dari penghutang.

Bab Keempat, Bab ini merupakan pembahasan pokok yang akan menjawab persoalan yang diangkat. Bab ini berisikan analisis sosiologi hukum berupa faktor-faktor yang menyebabkan adanya wanprestasi, serta penerapan konsep sosiologi pengetahuan dengan teori konstuksi sosial dan kesadaran hukum.

Bab Kelima, dalam bab kelima ini penieliatian membahas tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang ada di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyusunan yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan, yakni:

1. Dalam penyusunan ini terdapat beberapa kesimpulan diantaranya yang pertama adalah faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab masyarakat di BUMDESMA Bayan melakukan kredit macet secara berulang-ulang adalah pandangan masyarakat Bayan terhadap perjanjian kredit yang didasarkan pada pola pikir atau sistem lama dimana kredit macet sudah dianggap suatu yang biasa atau lumrah, faktor lainnya adalah pola hidup masyarakat Bayan khususnya perempuan yang lebih dekat dengan hal-hal konsumtif sehingga mendorong terjadinya kredit macet, dan tingkat atau kondisi perekonomian di wilayah bayan yang juga menjadi faktor munculnya wanprestasi kredt macet.
2. Mekanisme penyelesaian wanprestasi di BUMDESM Bayan dilakukan beberapa tahap. Tahap awal jika kredit bermasalah/macet sudah mulai teridentifikasi adalah mengkoordinasikan anggota yang teridentifikasi mulai bermasalah dengan ketua kelompoknya. Tahap kedua jika ketua kelompok

sudah menyerahkan penyelesaian wanprestasi pada pihak BUMDESMA maka pihak BUMDESMA akan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Tahap ketiga dalam pemanggilan bersama kepala desa tersebut pihak BUMDESMA bersama kepala desa mengidentifikasi permasalahan apa yang dialami oleh nasabah. Jika dalam penyelesaian administrasi tersebut pihak nasabah masih tidak memenuhi prestasinya maka pihak BUMDESMA bersama kepala desa akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk meningkatkan kesadaran nasabah bahwa perjanjian kredit yang menjadi tanggung jawabnya harus dipenuhi.

3. Praktik wanprestasi berupa kredit macet terkait analisis momen dalam sosiologi pengetahuan dapat disimpulkan bahwa kebiasaan atau terjadinya kredit macet yang berulang-ulang berdasarkan pemikiran Berger dan Luckmann sudah melalui tiga momen yaitu; eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Terjadinya kredit macet yang sudah dilakukan berulang-ulang ini dapat dikatakan bahwa pola pemikiran yang ada dimasyarakat dipegaruhi oleh apa yang dilakukan sejak dulu dan sudah di praktikkan oleh banyak orang. Hal ini juga dipengaruhi oleh proses interaksi dalam hubungan kelompok simpan pinjam perempuan yang mengalami sosialisasi erat antar individu sehingga membentuk tradisi atau cenderung melakukan perbuatan kredit macet secara berulang. Jika tidak diseimbangkan dengan kesadaran subjektif dari tiap individu maka tradisi dalam melakukan tunggakan kredit ini

akan selalu terulang dan terjadi terus menerus bahkan dapat menjadi tradisi atau kebiasaan. Kesadaran subjektif masyarakat yaitu kesadaran akan suatu aturan atau hukum dalam hal ini dapat dicapai dengan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan perilaku hukum.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penyusunan ini sebagai berikut:

Dalam penyusunan ini penyusun menyarankan agar kesadaran subjektif dari dalam diri masyarakat ditingkatkan dan digali. kesadaran subjektif ini akan menjadi alat untuk mengubah kebiasaan atau pola pikir serta sistem yang dulu ada sehingga masyarakat bisa menyesuaikan sistem yang diciptakan pada saat ini. Kesadaran itu dapat dibangun dari indikator kesadaran hukum dimana pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap aturan perlu diterapkan. Hal ini dikarenakan dalam kredit macet di wilayah BUMDESMA erat kaitannya dengan kontruksi sosial, maka penting untuk melakukan sosialisasi manfaat serta makna dari dibuatnya perjanjian ke masyarakat umum secara terbuka dan jelas.

Mekanisme penyelesaian kredit macet perlu ditingkatkan lagi guna memperlancar pembayaran kredit. Upaya lain perlu dilakukan untuk lebih memberikan peringatan dan efek jera bagi para debitur. Upaya-upaya sosial lainnya dapat ditingkatkan dengan melakukan sanksi administrasi yang lebih ketat lagi, seperti penahanan surat

berbentuk apapun yang dikeluarkan oleh desa untuk nasabah yang melakukan wanprestasi kredit macet. Selain itu peningkatan analisis 5C (character, capacity, capital condition dan collateral) agar dapat dilakukan dengan maksimal dan jika ada pelanggaran harus ditindak secepat mungkin.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: Syamil Quran, 2009.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Imam al-Bukhari, Abu Hasan al-Sindi, Shahih al-Bukhari bihasiyat al-Imam al-Sindi, juz II, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), hlm. 105.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Laksbang Mediatama Yogyakarta: Surabaya, 2008).

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Ibrahim, Johannes, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, (Mandar Maju: Bandung, 2004).

Khirandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama*, (FH UII Press: Yogyakarta).

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007).

Miru, Ahmad, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada, 2008).

Muhammad, Abdul Kadir *Hukum Perjanjian*, (Alumni: Bandung, 2004).

Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta : Sinar Gafika, 2008, cet 5).

Sinaga, Budiman N.P.D., *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada , 2005).

Soekanto, Soerjono, Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002).

Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, (Alumni: Bandung, 1995).

Subekti, R. dan Tjitrosudibjo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004).

Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1992).

S. Sabiq, *Fiqih Sunnah*. jilid 4, Penerjemah: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara: 2006).

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2001).

Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini, *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, dan dilanjutkan berdasarkan surat keputusan menteri No.414.2./675/PMD Tahun.

Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Pasal 1 ayat 32 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II /2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.

5. Jurnal

Arifin, Syaiful, “Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No. 3 September 2008.

Hutabarat, Raisa Betsaida, “Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpmd) Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”, *Jurnal JOM FISIP* Vol. 3 No. 2 Oktober 2016.

Manuaba, I. B. Putera, “Memahami Teori Konstruksi Sosial”, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Vol. 21 - No. 3 / 2008-07.

Marzuki, Peter Mahmud, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”, *Jurnal Yuridika*, Volume 18 No.3, 2003.

Muayyad, Ubaidullah “Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam”, *Jurnal 'Anil Islam*, Vol. 8. Nomor 1, Juni 2015.

Muhtarom, M., “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: 48-56.

Ramdani, “Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)”, *Jurnal Al Amwal*: Vol. 1, No. 1, Agustus 2018.

Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018.

Rosana, Ellya, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014.

Saripudin, Udin, “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013.

Sinollah, “Peranan Simpan pinjam perempuan dalam PNPM-MP untuk kesejahteraan masyarakat”, *Jurnal Dialektika*, Volume 4, Nomor 2, September 2019.

6. Karya Ilmiah

Asqolani, Aswan, *Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm-Mp-Spp) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun*, Program Diploma IV Manajemen Pemerintahan (Universitas Jambi, 2017).

7. Wawancara

Wahyuni, Dwi Sekertaris BUMDESMA Kecamatan Bayan, tanggal 2 Mei 2021.

Atmoko Siswo, Ketua BUMDESMA Kecamatan Bayan, tanggal 2 Mei 2021.

Wulandari, Agustina Dwi, pegawai BUMDESMA Bayan, tanggal 27 Mei 2021.

A, Ketua anggota kelompok nasabah kredit macet BUMDESMA Bayan, tanggal 25 Mei 2021.

B, Anggota kelompok nasabah kredit macet BUMDESMA Bayan, tanggal 27 Mei 2021

C, Anggota kelompok nasabah kredit macet BUMDESMA Bayan, tanggal 27 Mei 2021.

D, Anggota kelompok nasabah kredit macet BUMDESMA Bayan, tanggal 28 Mei 2021.

E, Ketua anggota kelompok nasabah kredit macet BUMDESMA Bayan, tanggal 25 Mei 2021.

F, Anggota kelompok nasabah kredit macet BUMDESMA Bayan, tanggal 25 Mei 2021.

G, Anggota kelompok nasabah kredit macet BUMDESMA Bayan, tanggal 27 Mei 2021.

H, Anggota kelompok nasabah kredit macet BUMDESMA Bayan, tanggal 25 Mei 2021.

I, Anggota kelompok nasabah kredit macet BUMDESMA Bayan, tanggal 30 Mei 2021.

J, Anggota kelompok nasabah kredit macet BUMDESMA Bayan, tanggal 26 Mei 2021.

8. Lain-lain

Antonio, M. Syafii *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2012).

Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen”, diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>, pada Kamis 25 februari pukul 8.25wib.

Bappeda, *Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami kenaikan*, diakses dari <https://bappeda.purworejokab.go.id/tingkat-kemiskinan-kabupatenkota-di-jawa-tengah-mengalami-kenaikan>, pada Kamis 25 februari pukul 8.25wib.

Berger, Peter L., *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES 1991).

Fahmi, Irham, *Analisis Kredit dan Fraud Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: PT Alumni, 2008).

Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

G.J., Renier, *History its Purpose and Method*, alih bahasa Muin Umar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

Haris, Herdiansyah, *Metodologi Penyusunan Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)

Ikatan bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Setia, 2013).

“Kabupaten Purworejo Dalam Angka 2020”, <https://purworejokab.bps.go.id/publication/2020/04/27/a7151bd38600994d194b2d41/kabupaten-purworejo-dalam-angka-2020.html>, akses 8 Agustus 2021.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

- Kuncoro, Mudjarad dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2011).
- M. Burhan, Bungin, *Penyusunan Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Moleong, Lexy J. M.A. *Metodologi Penyusunan Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2012).
- Pusat Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”, (<http://kbbi.web.id/>, 2016), diakses P. L., Berger, *Piramida Kurban Manusia*, Alih bahasa Rahman Tolleng (Jakarta: LP3ES, 1982).
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan. Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi pertama, (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta, 2001).
- Supriyanto, Gatot, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009).
- W. L. Neuman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, Fifth Edition, (Boston: Pearson Education, 2003).
- Veithzal Rivai, dan Veithzal, Andria Permata, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Zed, Mestika, *Metode Penyusunan Kepustakaan*, (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2004).